



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA MERGER MASKAPAI PENERBANGAN MILIK PEMERINTAH

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berencana untuk melakukan merger tiga maskapai penerbangan Pemerintah, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; PT Citilink Indonesia, dan PT Pelita Air Service (Pelita Air). Citilink Indonesia merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 67% dan 33% lainnya milik PT Aerowisata. Sementara saham Pelita Air milik PT Pertamina (Persero), selaku BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pelita Air merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor penerbangan.

Ada dua alasan dilakukannya merger, yaitu sebagai lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan sejak 2021. Sebelumnya, BUMN telah melakukan merger pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo dari yang semula empat perusahaan digabung menjadi satu perusahaan. Setelah Pelindo, merger akan dilakukan terhadap BUMN klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Merger maskapai penerbangan diyakini akan menurunkan biaya logistik seperti halnya merger Pelindo sehingga industri penerbangan semakin kuat dan efisien. Pada merger Pelindo berhasil menurunkan biaya logistik, yang semula mencapai 23% menjadi hanya 11%.

Merger juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat, padahal Indonesia adalah negara kepulauan sedangkan AS negara dengan satu pulau. AS dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta populasi dengan rata-rata *Gross Domestic Product* (GDP) mencapai US\$40.000 (setara Rp611,7 juta) terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik. Sedangkan di Indonesia terdapat 280 juta penduduk dengan GDP US\$4.700 (setara Rp71,8 juta) yang berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat. Saat ini Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Kementerian BUMN menargetkan penambahan sebanyak 30 unit pesawat sampai dengan tahun 2026.

Rencana merger maskapai penerbangan tersebut mendapat komentar dari banyak pihak, diantaranya pengamat penerbangan yaitu Alvin Lie. Menurut Alvin, ketiga maskapai penerbangan milik pemerintah sebaiknya disiapkan untuk bersaing secara sehat dengan pihak swasta. Alvin juga mengingatkan Garuda sudah memiliki komitmen jangka panjang terhadap kreditur-krediturnya, yang piutangnya direstrukturisasi melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perubahan struktur pascamerger dikhawatirkan akan membuat para kreditur kebingungan. Oleh karena itu Garuda Indonesia sebaiknya fokus untuk menunaikan kesepakatan yang ada dalam PKPU, apalagi Garuda Indonesia sudah banyak melakukan pembenahan, menjalankan pola bisnisnya dengan hati-hati dan selektif, dan keuangan Garuda Indonesia juga sudah sehat. Ketiga Maskapai penerbangan pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan bisnisnya masing-masing, saling mengisi celah, atau membuka layanan penerbangan pada rute-rute yang belum dimasuki maskapai swasta.

Dalam perkembangannya Menteri BUMN, Erick Thohir mengemukakan bahwa dalam merger maskapai penerbangan milik pemerintah, Garuda Indonesia akan tetap berdiri sebagai satu entitas, sedangkan yang akan dilebur Citilink dan Pelita Air. Ketiga maskapai tersebut nantinya akan tetap beroperasi sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Garuda Indonesia akan melayani segmen premium, Pelita Air melayani pasar ekonomi premium, sedangkan Citilink melayani pasar *low-cost carrier*.

Tahapan merger dua perusahaan (Citilink dan Pelita Air) sudah mencapai 30% dan terus dibahas Kementerian BUMN, termasuk konsolidasi pembukuan keuangan kedua maskapai. Rencana penggabungan kedua maskapai penerbangan nasional tersebut ditargetkan dapat terlaksana dalam rentang waktu tahun ini atau awal tahun mendatang.

Atensi DPR

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih sehingga membentuk sebuah perusahaan baru hasil merger. Merger maskapai penerbangan milik pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati agar maksud dilakukannya merger yaitu Indonesia memiliki maskapai penerbangan yang kuat, efisien, dan mampu memberikan layanan yang baik kepada konsumennya dengan harga terjangkau dapat tercapai. Kehati-hatian dalam melakukan merger juga penting dilakukan karena Garuda Indonesia sudah memiliki komitmen jangka panjang terhadap kreditur-krediturnya yang piutangnya direstrukturisasi melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sehubungan dengan hal tersebut, maka penting bagi Komisi VI DPR RI untuk mengawal merger maskapai penerbangan milik Pemerintah agar dapat dilakukan dengan baik dan mendatangkan manfaat. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu meminta kepada Menteri BUMN melakukan kajian yang mendalam dan serius terkait merger maskapai penerbangan milik Pemerintah dan selalu menyampaikan laporan perkembangannya kepada Komisi VI DPR RI.

Sumber

bisnis.tempo.co, 31 Agustus 2023;
economy.okezone.com, 1 September 2023;
msn.com, 4 September 2023;
Rakyat Merdeka, 28 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023